

BAB II

EKONOMI KEJAHATAN

2.1. Definisi dan Klasifikasi Kejahatan

Hukum mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang menurut undang-undang adalah pelanggaran dan menggunakan mekanisme yang dimiliki (penyelidikan, tuntutan, dakwaan, dan vonis) untuk meresponnya. Definisi tersebut memiliki kelemahan mendasar: meskipun sebuah aksi sangat imoral, berbahaya, dan merusak, aksi tersebut tidak akan didefinisikan sebagai kejahatan apabila tidak dimasukkan ke dalam undang-undang.⁵ Penggunaan undang-undang sebagai penentu apakah sebuah aksi merupakan kejahatan atau bukan merupakan sesuatu yang dianggap sakral. Hal ini dikarenakan undang-undang merupakan representasi, dari konsensus bersama rakyat sebuah negara, dalam mendefinisikan kejahatan. Oleh karena itu maka instansi pemerintah dan atau lembaga formal yang berurusan dengan kejahatan akan menggunakan definisi kejahatan menurut undang-undang yang berlaku.

Kriminologi sendiri menganggap kejahatan merupakan suatu perilaku, yang mencederai moral dasar manusia seperti penghargaan terhadap properti dan perlindungan terhadap penderitaan orang lain. Meskipun begitu, moral dasar ini dapat berbeda berdasarkan waktu dan komunitas.⁶ Definisi lain dalam kriminologi mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang sangat merusak sehingga dilarang oleh undang-undang kejahatan.⁷ Sebuah pola yang sama, dari definisi menurut kriminologi, adalah kejahatan merupakan sebuah perilaku: tindakan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menetap dan melekat pada suatu orang. Kaitannya dengan hal ini, Durkheim (1895/1938) menegaskan bahwa sebuah perilaku dapat

⁵ Katherine Williams, 1991, *Textbook on Criminology*. 3rd edition. London: Blackstone Press Limited, hal 11-16

⁶ Adler, Mueller, dan Laufer, 2001, *Criminology*, 4th edition. New York: McGraw-Hill, hal 11.

⁷ Steven E. Barkan, 2005, *Criminology: a sociological understanding*, 3rd edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, chapter 1 hal 12

dikategorikan sebagai kejahatan setelah melalui pendefinisian dan keputusan kolektif grup.⁸

Kejahatan oleh kriminologi dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu: kejahatan dengan kekerasan, kejahatan properti, kejahatan terorganisir, dan kejahatan melawan ketertiban publik. Kejahatan dengan kekerasan menempatkan fisik korban dalam kondisi terancam di mana sebagian besar kejahatan ini bertujuan untuk melukai korbannya. Aksi kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dengan kekerasan adalah: pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan perampokan.

Yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan dengan terorganisir, oleh grup atau organisasi, dengan tujuan menciptakan pendapatan tetap bagi anggota grup tersebut. Sedangkan kejahatan melawan ketertiban publik didefinisikan sebagai kejahatan yang menyebabkan publik tidak dapat berfungsi dan beroperasi secara efisien karena bertentangan dengan norma dan moral yang dipegang oleh publik. Contoh dari kejahatan publik adalah dari penyalahgunaan obat bius, alkohol, serta aksi prostitusi.⁹

Ilmu ekonomi sendiri memandang kejahatan sebagai sesuatu yang menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumberdaya dan mendistorsi harga sehingga jumlahnya harus ditekan. Oleh karenanya, ilmu ekonomi menggunakan kerangka yang dimiliki, dalam mengoptimalkan alokasi penggunaan sumber daya, untuk menekan angka kejahatan ke tingkat serendah-rendahnya.

Analisa ekonomi dalam tindak kejahatan digunakan untuk menganalisis kejahatan properti yaitu kejahatan dengan motif meningkatkan utilitas (pendapatan) bagi si pelaku. Terdapat asumsi rasionalitas dalam ekonomi kejahatan yaitu pelaku kejahatan melakukan aksinya berdasarkan perhitungan *cost benefit* dan melakukan respon terhadap insentif. Oleh karenanya, kejahatan yang bisa dianalisa melalui pendekatan ekonomi adalah kejahatan properti. Kejahatan properti adalah kejahatan yang ditujukan untuk mengambil harta benda korban. Pada umumnya dilakukan

⁸ Lydia Voigt (et al), 1994, *Criminology and Justice*, New York: McGraw-Hill, hal 4.

⁹ Adler, Mueller, dan Laufer, 2001, *Criminology*, 4th edition. New York: McGraw-Hill, part III.

dengan sembunyi-sembunyi (*stealth*), tidak menggunakan kekerasan, serta dilandasi dengan perhitungan rasional. Termasuk dalam kejahatan properti adalah penipuan, pencurian di luar bangunan dan dalam bangunan.¹⁰

Setelah berkonsultasi dengan bagian kriminologi UI, penelitian ini memasukkan perampokan dalam kejahatan properti. Hal ini disebabkan kebanyakan kasus perampokan di Indonesia didominasi oleh motif ekonomi berbeda dengan definisi di AS yang kebanyakan kasus perampokan didominasi oleh masalah sosial-kejiwaan si penyerang. Dengan demikian kejahatan properti yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah penipuan, pencurian, dan perampokan.

2.2. Biaya dari Kejahatan

Meskipun biaya langsung yang terbesar ditanggung oleh korban kejahatan, bukan berarti korban kejahatan merupakan satu-satunya pihak yang menanggung biaya kejahatan. Aksi kejahatan menimbulkan biaya bagi setidaknya empat pihak yaitu: korban, potensial korban, pelaku, dan publik.¹¹

2.2.1. Biaya Korban Kejahatan

Korban kejahatan didefinisikan sebagai pihak yang menderita tindak kejahatan. Korban kejahatan menanggung biaya langsung berupa hilangnya barang berharga yang dimiliki, biaya perawatan medis akibat luka fisik dan non fisik yang dialami, serta rusaknya properti pengamanan akibat pembobolan. Biaya ini merupakan komponen biaya langsung yang dapat dikuantifisir dengan cara menghitung jumlah total harta rampasan yang diambil pelaku, biaya perbaikan properti/alat pengamanan, serta biaya berobat korban.

Selain itu, terdapat *opportunity cost* berupa waktu bekerja yang hilang selama pemulihan dikalikan upah kerja. *Opportunity cost* tersebut akan semakin besar apabila korban tidak mampu menanggulangi beban mental trauma akibat tindak kejahatan. Beban mental ini berupa *posttraumatic stress disorder* (PTSD) yaitu

¹⁰ Arthur O'Sullivan, 2003. *Urban Economics*. 5th edition. New York: McGraw-Hill, Hal.257-258

¹¹ Brand, Sam dan Price, Richard, 2000, *The economic and social cost of crime*, London : Home Office.

kondisi trauma pasca terjadinya kejahatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi mental korban. PTSD muncul berupa kepribadian yang merusak diri sendiri dan sikap agresif. Beban mental lainnya adalah degradasi status akibat stigma sosial yang umumnya terjadi pada korban kekerasan seksual.

2.2.2. Biaya Potensial Korban

Potensial korban akan menanggung beban berupa penambahan alat-alat pengamanan (untuk mengantisipasi tindak kejahatan), belanja asuransi untuk mengurangi resiko kejahatan, penurunan kualitas hidup akibat ketakutan (akan terjadinya tindak kejahatan), dan *opportunity cost* dari aktivitas bebas yang terhalang (akibat ketakutan terhadap kejahatan).

Meskipun begitu, terdapat irisan luas antara komponen belanja penambahan alat-alat pengamanan, dengan belanja publik yang normal untuk mencegah kejahatan. Diferensiasi dari kedua komponen ini adalah perbandingan tingkat kejahatan di sebuah daerah. Tingkat kejahatan yang relatif tinggi akan menyebabkan publik menambah belanja pengamanan sehingga akan lebih besar dari belanja normal yang dikeluarkan oleh sebuah komunitas yang relatif aman.

2.2.3. Biaya Pelaku Kejahatan

Biaya pelaku kejahatan adalah *opportunity cost* dari waktu pelaku dipenjara yang bervariasi pada setiap pelaku kejahatan. Besar *opportunity cost* ini didapat dari pendapatan yang hilang selama dipenjara. Biaya ini dapat diperbesar dengan meningkatkan probabilitas tertangkap/dipenjara, memperlama waktu dipenjara, dan meningkatkan pendapatan legal pelaku. Semakin besar ketiga variabel tersebut, *opportunity cost* dari pelaku kejahatan akan semakin besar sehingga memperkecil insentif untuk melakukan tindak kejahatan.

Pendekatan ekonomi mengungkapkan bahwa terdapat tiga alasan dari pelaku kriminal dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindak kejahatan. Pertama, pelaku kejahatan properti tersebut -secara relatif- merupakan orang yang memiliki kemungkinan tertangkap sangat rendah, sementara *expected return* yang diharapkan

dari harta benda hasil kejahatan (*expected loot*) sangat besar. Hal tersebut dimungkinkan karena ia memiliki pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tindak kejahatannya. Kejahatan tipe ini umumnya terjadi pada *white collar crime*.

Kedua, pelaku kejahatan properti tersebut, apabila tertangkap dan dipenjara, memiliki *opportunity cost* yang rendah. Rendahnya *opportunity cost* disebabkan tidak produktifnya aktivitas yang dilakukan oleh mereka apabila berada di luar penjara. Hal ini menjelaskan penyebab kejahatan properti yang dilakukan oleh orang miskin.

Ketiga, pelaku kejahatan properti sama sekali tidak memiliki rasa hormat terhadap nilai dan norma dalam masyarakat sehingga tidak menganggap bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang salah. Hal ini menjelaskan mengapa kejahatan properti dapat terjadi meskipun *net-return* nya sedikit.

2.2.4. Biaya Publik

Biaya yang diimban oleh publik adalah segala biaya yang timbul berupa: pencegahan suatu tindak kejahatan, hukuman untuk pelaku kejahatan, dan penurunan kualitas lingkungan akibat tindak kejahatan. Terdapat irisan antara biaya untuk menghukum pelaku dengan biaya untuk pencegahan kejahatan. Ini disebabkan hukuman untuk kejahatan sering dimaksudkan untuk mencegah calon pelaku kejahatan melakukan aksi serupa. Biaya untuk patroli keamanan (polisi dan komponen keamanan lain) merupakan komponen biaya eksplisit yang jelas dapat dikategorikan sebagai biaya yang dikeluarkan publik untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sukses. Sementara itu, biaya untuk penangkapan, penyidikan, penyelidikan, pengadilan, dan fasilitas rehabilitasi pelaku kejahatan merupakan biaya yang sering dianggap sebagai biaya untuk menghukum pelaku kejahatan.

Biaya yang secara signifikan dapat dirasakan oleh publik adalah biaya penurunan kualitas lingkungan dan distorsi ekonomi akibat maraknya tindakan kejahatan di lingkungan mereka. Hasil penelitian Cullen dan Levit (1999) menunjukkan bahwa peningkatan kejahatan di kota sebesar 10 persen akan menurunkan populasi kota sebesar 1 persen dengan rumah tangga berpendidikan tinggi dan rumah tangga memiliki anak yang paling responsif terhadap kejahatan

tersebut.¹² Padahal, rumah tangga berpendidikan tinggi memiliki kemampuan untuk menyebarkan eksternalitas positif yang besar di sebuah komunitas. Perginya rumah tangga tersebut akan menyebabkan hilangnya potensi eksternalitas positif yang akan merugikan sebuah komunitas di kota.

Tingginya tingkat kejahatan juga akan mendistorsi ekonomi sebuah komunitas. Fasilitas publik seperti taman, perpustakaan, tempat parkir umum, dan sarana-sarana lainnya akan berkurang akibat tingginya biaya perawatan dan biaya perbaikan karena aksi-aksi vandalis. Pekerja publik di daerah tinggi kejahatan juga akan meminta upah lebih tinggi yang memberikan insentif mereka bekerja di sana. Hal serupa juga terjadi pada pertokoan dan jasa pelayanan. Jumlahnya akan berkurang, meskipun beroperasi, bisnis tersebut akan beroperasi pada biaya tinggi untuk menutupi biaya pengamanan dan asuransi.

Sedikitnya aktivitas bisnis akan menyebabkan minimnya kesempatan kerja sehingga pengangguran di daerah tersebut akan tinggi dan para pekerjanya harus melakukan komuting untuk dapat bekerja. Hal ini akan mengurangi tingkat pendapatan *real* penduduk daerah tersebut.¹³ Selain itu, pajak yang lebih tinggi - untuk membiayai peradilan, pencegahan kejahatan, dan pelayanan kesehatan untuk korban kejahatan- akan mendistorsi investasi dan tabungan di daerah tersebut.

2.3. Asumsi Rasionalitas dalam Ekonomi Kejahatan

Ekonomi Kejahatan mengasumsikan rasionalitas pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Pelaku kejahatan akan melakukan tindak kejahatan apabila manfaat yang diperoleh (harta rampasan melebihi) biaya dari tindak kejahatan (peluang tertangkap dan biaya jika tertangkap). Dengan kata lain, pelaku kejahatan merespon insentif berupa *net benefit* dari tindak kejahatan. Hal ini rasional dilakukan untuk meningkatkan utilitas. Kejahatan bagi pelaku merupakan cara untuk meningkatkan utilitas dengan memperbesar pendapatan secara ilegal. Kurva utilitas

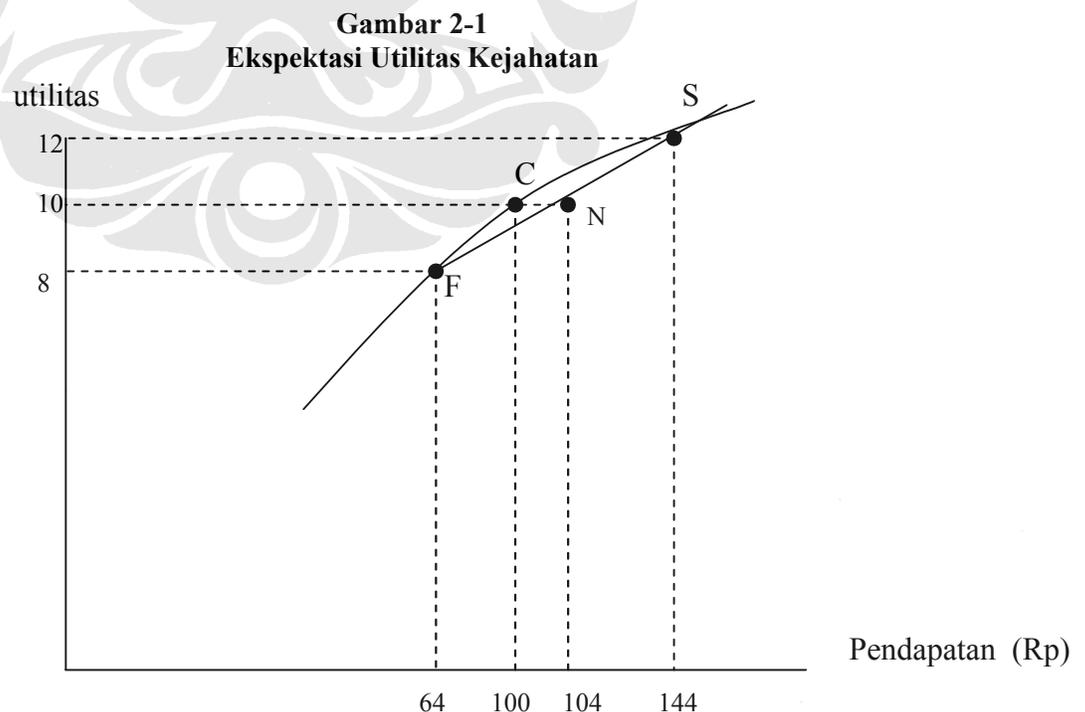
¹²Levitt, Steven D; Julie Berry Cullen. 1999. "Crime, Urban Flight, and the Consequences for Cities" The Review of Economics and Statistics, Vol. 81, No. 2, pp. 159-169.

¹³ Brand, Sam dan Price, Richard, 2000, *The economic and social cost of crime*, London : Home Office. Hlm 52

menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat utilitas, berbentuk *concave* karena menunjukkan asumsi *diminishing marginal utility income* yaitu naiknya utilitas akibat naiknya pendapatan pada tingkat yang berkurang.

Dari gambar 2-1 dapat dilihat bahwa pada titik C, pendapatan pelaku dengan berprofesi legal adalah sebesar Rp 100 dengan utilitas sebesar 10. Titik S menggambarkan kejahatan yang sukses yaitu penghasilan sebesar Rp 144 dengan utilitas sebesar 12, sementara titik F menggambarkan kejahatan yang gagal dengan penghasilan sebesar Rp 64 (waktu bekerja legal berkurang akibat dipenjara) dengan utilitas sebesar 8. Dengan probabilitas berhasil dan gagal sebesar 50-50 maka *expected utility* dari tindak kejahatan adalah sebesar: $0.5 \times 12 + 0.5 \times 8 = 10$ yaitu titik N.

Titik N merupakan kondisi indiferen dengan titik C sebagai pekerja legal. Tindak kejahatan akan terjadi apabila *expected utility* dari tindak kejahatan lebih dari 10; dengan penurunan probabilitas tertangkap, penurunan upah pekerjaan legal, atau peningkatan harta rampasan kejahatan. Sebaliknya, pengurangan tindak kejahatan akan terjadi dengan mengurangi *expected utility* kurang dari 10; memperbesar probabilitas tertangkap, memperbesar upah pekerjaan legal, atau mengurangi harta rampasan kejahatan.



Sumber: Sullivan, Arthur O'. Urban Economics, 6th Edition, hal. 261

Tabel 2-1
Ekspektasi Utilitas Kejahatan

	Basis	Peluang Dipenjara Lebih Tinggi	Waktu Dipenjara Lebih Lama	Harta Rampasan Sedikit	Pendapatan Lebih tinggi	Peluang Dipenjara Lebih rendah
<u>Pendapatan Legal (\$)</u>	100	100	100	100	400	100
Harta Rampasan (\$)	44	44	44	21	44	44
Peluang Dipenjara	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.25
Lama Waktu Dipenjara	0.36	0.36	0.51	0.36	0.36	0.36
Utilitas Legal = (Pendapatan Legal)^{1/2}	10	10	10	10	20	10
<u>Utilitas Kejahatan Properti Sukses</u>						
Pendapatan Bersih = Pendapatan Legal + Harta Rampasan	144	144	144	121	444	144
Utilitas = (Pendapatan Bersih) ^{1/2}	12	12	12	11	21	12
<u>Utilitas Kejahatan Properti Gagal</u>						
Biaya dipenjara = Lamanya dipenjara . pendapatan legal	36	36	51	36	144	36
Pendapatan bersih = pendapatan legal – biaya dipenjara	64	64	49	64	256	64
Utilitas = (pendapatan bersih) ^{1/2}	8	8	7	8	16	8
Ekspektasi Utilitas Kejahatan						
Properti (utils)	10	9	9.5	9.5	18.5	11

Sumber: Sullivan, Arthur O'. Urban Economics, 6th Edition, hal. 262

Dari tabel 2-1 dapat dilihat beberapa kondisi berupa pendapatan sektor legal, pendapatan dengan kejahatan sukses, dan pendapatan dengan kejahatan yang gagal. Dengan beberapa skenario: peluang dipenjara lebih tinggi, waktu dipenjara lebih

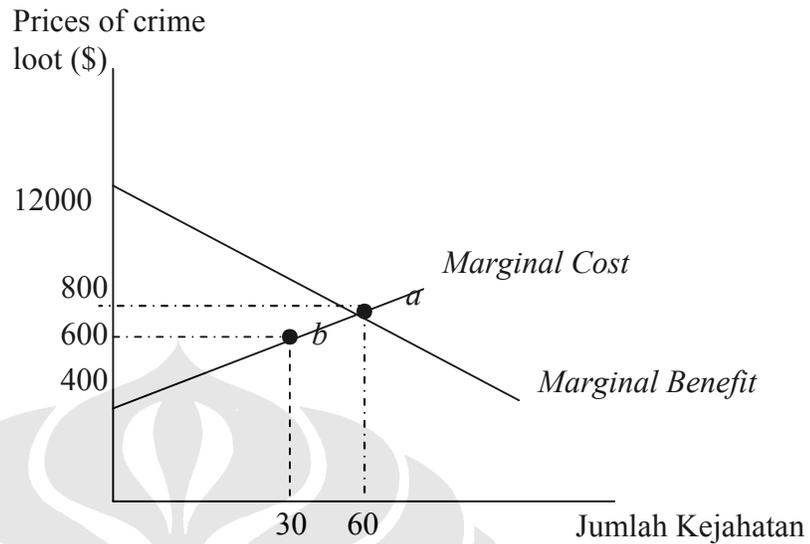
lama, harta rampasan lebih sedikit, dan peluang dipenjara lebih rendah. Dalam keadaan normal (basis) dapat dilihat bahwa terjadi kondisi indifferen antara ekspektasi utilitas dari tindak kejahatan (10 util) dengan utilitas pendapatan di sektor legal (10 util) sehingga tidak terdapat insentif untuk melakukan kejahatan bagi calon pelaku kejahatan. Apabila dipeluang dipenjara dipertinggi, dengan kebijakan tertentu, ekspektasi utilitas melakukan kejahatan akan lebih kecil (9 util) dibandingkan dengan utilitas pendapatan di sektor legal. Dalam kondisi ini, pekerja legal tidak akan melakukan tindak kejahatan dan lebih memilih untuk tetap pada pekerjaan legalnya dengan utilitas yang lebih tinggi.

Sama halnya apabila kebijakan tertentu diarahkan untuk memperlama waktu dipenjara atau memperkecil harta rampasan, ekspektasi utilitas tindak kejahatan akan lebih kecil (9,5 util) daripada utilitas kejahatan di sektor legal (10 util). Apabila kebijakan ekonomi dilakukan untuk memperbesar pendapatan perkapita yang lebih tinggi, ekspektasi utilitas dari tindak kejahatan akan lebih besar daripada sebelumnya (18,5 util) akibat kenaikan harta rampasan, namun secara relatif ekspektasi utilitas kejahatan tersebut akan tetap lebih rendah daripada utilitas pendapatan di sektor legal yang juga meningkat (20 util).

Apabila pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan hukum yang lebih baik sehingga peluang dipenjara menjadi lebih rendah maka ekspektasi utilitas dari tindak kejahatan akan menjadi lebih tinggi (11 util) daripada utilitas pendapatan di sektor legal. Hal ini disebabkan peningkatan ekspektasi utilitas kejahatan yang lebih tinggi akibat rendahnya peluang dipenjara.

Rasionalitas pelaku kejahatan dapat dilihat juga dari kurva *marginal cost* dan *benefit* pelaku kejahatan yang menyerupai *marginal cost* dan *marginal revenue* suatu perusahaan. Pada gambar 2-2, *marginal cost* positif karena *opportunity cost* yang bervariasi. *Marginal cost* juga positif karena semakin banyak aksi kejahatan dilakukan, akan terjadi tambahan biaya bagi pelaku kejahatan (probabilitas ditangkap dan dipenjara, lama waktu dipenjara, *opportunity cost* waktu dipenjara, dan *anguish cost*).

Gambar 2-2



Sumber: Sullivan, Arthur O'. Urban Economics, 6th Edition, hal. 265

Marginal benefit dari pelaku kejahatan berbentuk negatif karena semakin banyak aksi kejahatan dilakukan, *loot* akan berkurang dengan tingkat kesulitan yang akan semakin besar (contoh: kejahatan di kereta listrik Jabotabek). Peran pemerintah dan swasta pada kondisi ini adalah memperbesar “*certainty of punishment*” sehingga menggeser kurva *marginal cost* ke atas dan tingkat kejahatan yang terjadi akan semakin kecil.

Pada Gambar 2-2 keseimbangan terjadi pada titik a di mana *marginal benefit* sama dengan *marginal cost*. Tindak kejahatan akan terjadi saat ekspektasi harta rampasan lebih besar dari \$400. Pada titik b yaitu saat jumlah kejahatan hanya 30, *marginal benefit* tindak kejahatan masih lebih besar daripada *marginal cost*-nya. Kondisi ini belum seimbang karena masih terdapat *marginal benefit* yang belum dieksploitasi dengan baik.

Jumlah kejahatan akan terus bertambah sampai mencapai titik keseimbangan yaitu pada titik a, di mana MB sama dengan MC dan jumlah kejahatan sebesar 60. Apabila lebih dari 60 kasus kejahatan, tambahan tindakan kejahatan akan menyebabkan kerugian karena *marginal cost* akan lebih besar dari *marginal benefit*. Seperti yang telah diungkapkan peran pemerintah dan swasta pada kondisi ini adalah

memperbesar “certainty of punishment” sehingga menggeser kurva marginal cost ke atas dan tingkat kejahatan yang terjadi akan semakin kecil.

2.4. Tingkat Keseimbangan Kejahatan

Setelah asumsi rasionalitas dicapai dalam keputusan individu, terdapat titik keseimbangan terjadinya kejahatan di suatu region yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan kejahatan. Penawaran kejahatan adalah jumlah aksi kejahatan yang akan dilakukan pada tingkat *loot* tertentu. Penawaran kejahatan tersebut berslope positif menandakan bahwa semakin besar *loot* maka akan semakin besar pula aksi kejahatan yang terancam untuk dilakukan. Permintaan kejahatan adalah jumlah aksi kejahatan yang akan dibiarkan pada tingkat *loot* tertentu. Dibiarkan karena biaya proteksi yang lebih tinggi daripada nilai *loot* tersebut. Permintaan kejahatan berslope negatif karena semakin kecil *loot*, semakin kecil proteksi yang dilakukan, sehingga semakin besar jumlah tindak kejahatan yang dibiarkan.

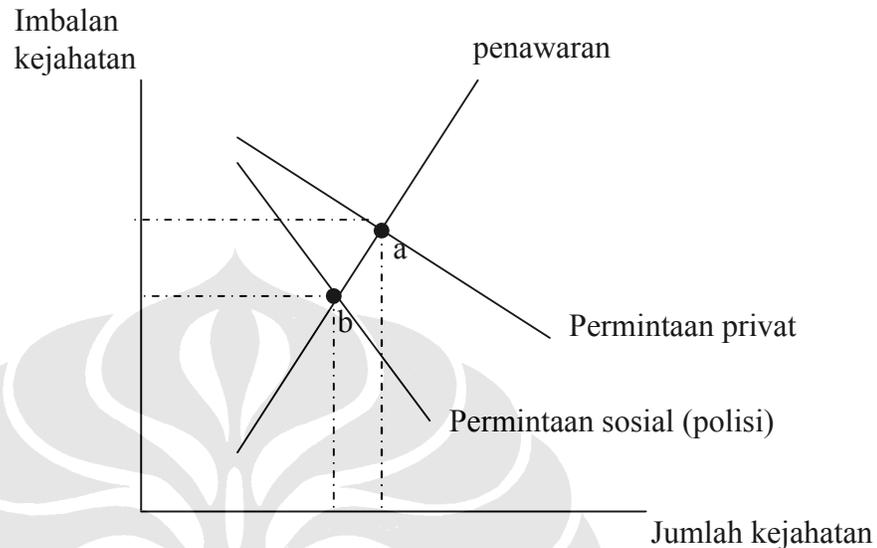
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran kejahatan yaitu: ekspektasi *loot* per aksi kejahatan, biaya langsung untuk memperoleh harta rampasan (termasuk biaya *self protection*), tingkat upah alternatif bekerja sektor legal, peluang tertangkap dan dipenjara, prospek lama dipenjara, dan selera individu dalam melakukan penawaran kejahatan (kombinasi antara nilai moral, kecenderungan melakukan kekerasan, dan preferensi terhadap resiko)¹⁴.

Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran (yang menyebabkan penawaran kejahatan pada tingkat *loot* tertentu naik/turun) berupa: perubahan demografi (kenaikan/penurunan proporsi usia muda), kesempatan kerja yang berkurang/bertambah pada tingkat upah tertentu, dan perubahan kebijakan pemenjaraan¹⁵.

¹⁴ Ehrlich, Isaac, 1996, *Crime, Punishment, and Market for Offense*, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, No. 1. (Winter, 1996), pp. 43-67.

¹⁵ Becci, Zsolt, 1999, *Economics and Crime in the States*. Atlanta: Federal Reserve Bank of Atlanta, hlm 39

Gambar 2-3
Permintaan dan Penawaran
Kejahatan



Sumber: Becsi, 1999

Permintaan kejahatan terdiri dari dua komponen. Pertama adalah permintaan langsung terhadap harta rampasan kejahatan, seperti layaknya pasar barang normal, yang terjadi pada *shadow economy*. Kedua adalah permintaan tidak langsung dari kejahatan, yang berasal dari *inverse demand* terhadap proteksi dan asuransi yang berhubungan negatif terhadap harta rampasan kejahatan. Sederhananya, semakin rendah harta rampasan maka akan semakin kecil proteksi dan asuransi yang dikenakan terhadap harta tersebut. Semakin besar harta rampasan, yang akan memicu semakin banyak aksi kejahatan, maka akan semakin besar pula proteksi yang akan dilakukan sehingga menaikkan biaya langsung dari aksi kejahatan bagi pelaku dan menurunkan benefit dari aksi kejahatan.

Kurva permintaan dapat bergeser (ke kiri) apabila terjadi perubahan kondisi korban kejahatan (rumah tangga) yang mengurangi benefit dari tindak kejahatan pada tingkat kejahatan tertentu. Dan meskipun secara normatif masyarakat mengharapkan tingkat kejahatan sebesar nol, kondisi tersebut hampir tidak mungkin terjadi, karena

pada kondisi tersebut publik melakukan proteksi berlebihan yang biayanya lebih besar terhadap nilai properti yang diproteksi.

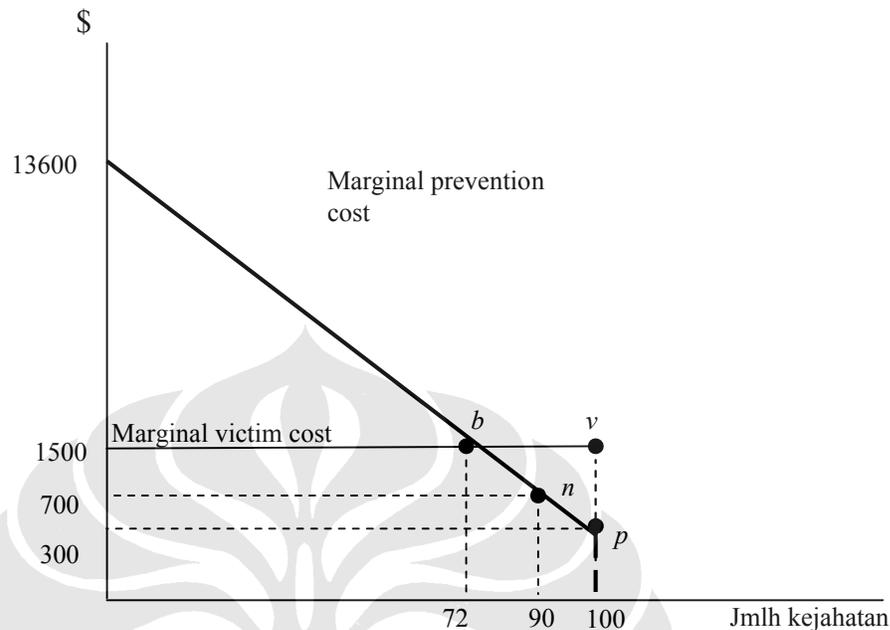
Kondisi yang terjadi pada titik a merupakan kondisi keseimbangan kejahatan yang terjadi tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Titik a bukan merupakan kondisi optimum sosial karena pada titik tersebut terlalu banyak tingkat kejahatan terjadi di suatu daerah. Pada kondisi tersebut, pemerintah harus turun tangan dengan membuat kebijakan yang menurunkan permintaan dan penawaran kejahatan sehingga terjadi kondisi optimum sosial kejahatan. Pada gambar 2-3, pemerintah mengintervensi dengan memberikan proteksi terhadap harta rampasan melalui institusi kepolisian. Intervensi ini menciptakan keseimbangan baru dengan menggeser permintaan kejahatan ke sebelah kiri sehingga tingkat kejahatan yang terjadi akan menjadi lebih kecil yaitu di titik b.

2.5. Tingkat Optimal Kejahatan

Publik, dengan sumber daya yang tersedia, berusaha untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan pengamanan dan kepastian hukuman. Hal tersebut menimbulkan biaya dalam usahanya sehingga dapat dikategorikan sebagai biaya pencegahan (*prevention cost*). Penambahan biaya pencegahan kejahatan akibat penambahan kasus kejahatan yang ingin dicegah disebut *marginal prevention cost* (MPC).

Pada gambar 2-4 diperlihatkan bahwa MPC tersebut memiliki slope negatif karena semakin banyak kejahatan yang ingin dicegah akan semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Apabila publik mengurangi kejahatan dari 100 ke 90 (dari titik p ke b) maka MPC yang harus dikeluarkan naik menjadi \$700 atau terdapat penambahan biaya sebesar \$400. Namun, apabila publik ingin mencegah lebih banyak kejahatan dari 90 ke 72 kasus, MPC yang harus dikeluarkan akan menjadi lebih banyak yaitu menjadi sebesar \$1500 atau naik sebesar \$800. Hal ini terjadi karena: semakin besar kasus yang ingin dicegah, tingkat kesulitannya akan semakin besar sehingga membutuhkan tambahan biaya pencegahan yang lebih banyak.

Gambar 2-4
Jumlah Kejahatan yang
Efisien secara Sosial



Sumber: Sullivan, Arthur O'. Urban Economics, 6th Edition, hal. 265

Sementara itu, korban kejahatan mengemban biaya berupa *opportunity cost* dari waktu kerja yang hilang, kehilangan moneter, dan biaya akibat cedera. Penambahan biaya dari korban kejahatan akibat penambahan satu kasus kejahatan disebut *marginal victim cost* (MVC). MVC tersebut diasumsikan tetap sebesar \$ 1500. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, meskipun publik menghendaki tingkat kejahatan menjadi sekecil-kecilnya, tingkat optimum kejahatan sendiri bukanlah nol melainkan pada sebuah titik tertentu di mana *marginal prevention cost* yang dikeluarkan untuk mencegah kejahatan sama dengan *marginal victim cost* yang diderita oleh korban.

Jumlah kejahatan optimum adalah titik di mana terjadi persilangan antara kedua kurva tersebut yaitu pada saat $MPC = MVC$. Pada gambar II.4 direpresentasikan dengan titik b yaitu pada jumlah kejahatan 72 dengan MPC dan MVC sebesar \$ 1500. Apabila kondisi kejahatan terjadi pada titik p dimana jumlah kejahatan 100, publik mengemban MVC sebesar \$1500 dengan hanya mengeluarkan MPC sebesar \$300. Publik akan terus mengurangi tingkat kejahatan hingga mencapai 72 kasus. Apabila jumlah kejahatan ditekan menjadi kurang dari 72 kasus maka

publik mengeluarkan MPC yang lebih besar daripada MVC yang diembannya, dalam kondisi ini publik dikatakan tidak rasional karena mengeluarkan biaya pencegahan yang lebih besar daripada kehilangan akibat terjadinya kejahatan. Publik akan mengurangi proteksi yang dilakukannya hingga tingkat kejahatan naik mencapai 72 kasus kembali.

Tabel 2-2
Biaya Kejahatan Properti di Inggris Tahun 1999

Kategori Biaya	Burglary	PNKB	PKB	Pengrusakan
Antisipasi Kejahatan	430	20	120	30
Belanja Pengamanan	330	-	70	10
Belanja Asuransi	100	20	50	20
Konsekuensi Kejahatan	1 400	230	730	420
Nilai harta yang hilang	580	150	460	-
Properti rusak	270	7	120	30
Perbaikan properti	-20	-30	-110	-
Hilangnya Produktivitas	40	4	20	30
Beban Mental Trauma	550	110	220	200
Penanganan Korban	4	0	0	0
Respon terhadap Kejahatan	490	90	30	60
Operasional Polisi	240	10	20	30
Penuntutan	8	4	1	1
Pengadilan Negeri	5	3	1	1
Pengadilan Tinggi/MA	10	4	1	1
Biaya Juri	2	1	6	0
Bantuan Hukum	20	9	2	2
Bantuan Pembelaan Non hukum	7	2	0	1
Biaya Kebijakan Hukuman Percobaan	20	10	2	2
Biaya Penjara	160	40	6	9
Biaya Lainnya	10	3	1	20
Total Biaya per Kasus	2300	340	890	510
PNKB	: Pencurian Non Kendaraan Bermotor			
PKB	: Pencurian Kendaraan Bermotor			

Sumber: Price dan Brand (1999)

Pada empiriknya, penelitian Miller, Cohen, dan Wiersema (1996) menunjukkan bahwa terdapat biaya korban kejahatan yang berbeda-beda sesuai dengan kategori kejahatannya. Meskipun tidak terdapat pengurangan atau penambahan MVC seiring peningkatan aksi kejahatan. Tabel 2-2 merepresentasikan biaya rata-rata dari kejahatan berdasarkan kategori kejahatan yang diambil dari penelitian Price dan Brand (1999).

2.6. Analisis Ekonomi untuk Pengoptimalan Kebijakan Publik

Tahun 1968, Gary S. Becker menggunakan analisa ekonomi untuk mengoptimalkan kebijakan publik dalam penanggulangan kejahatan. Variabel kebijakan publik dalam penelitian Becker adalah p dan f . P merupakan belanja publik (kepolisian, pengadilan, dll) yang menentukan besarnya peluang pelaku kejahatan tertangkap dan dihukum, sementara f adalah besarnya hukuman bagi pelaku kejahatan (f) serta jenis hukuman tersebut. Nilai optimal dari variabel-variabel tersebut dapat ditunjukkan melalui tiga jenis hubungan. Pertama adalah biaya (kerusakan) akibat tindak kejahatan (O), kedua adalah biaya anggaran untuk kebijakan publik " p " (kepolisian, pengadilan, dll), dan terakhir adalah hubungan pengaruh variabel " p " dan " f " terhadap variabel O .

Keputusan optimal didefinisikan oleh Becker sebagai keputusan yang meminimumkan *social loss income* dari kejahatan. Sosial *loss* tersebut adalah jumlah dari biaya korban kejahatan, biaya untuk menangkap dan menahan pelaku kejahatan, serta biaya untuk menghukum pelaku kejahatan. Kontribusi utama penelitian Becker adalah menunjukkan bahwa kebijakan optimal untuk memerangi kejahatan adalah bagian dari optimalisasi alokasi sumberdaya untuk mencapai sebuah tujuan sebaik-baiknya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi: pemakaian sumber daya yang terbatas menghasilkan tingkat utilitas atau profit yang maksimum.

Kebijakan publik dan usaha swasta untuk meminimumkan kejahatan membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, sumber daya tersebut harus dioptimalkan untuk mencapai tingkat kejahatan yang serendah-

rendahnya. Pengoptimalan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian (anggaran dan tindakan lainnya) lebih kepada variabel-variabel yang mempengaruhi permasalahan dan tingkat kejahatan secara signifikan.

2.7. Misinterpretasi Publik terhadap Variabel yang mempengaruhi Tingkat Kejahatan

Sering terdapat bias pada persepsi publik dalam melihat variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Bias ini berdampak negatif karena alokasi anggaran untuk mengatasi kejahatan, sering ditentukan oleh politisi dan eksekutif yang terpengaruh oleh persepsi publik yang memilihnya. Levitt (2004) memperlihatkan eksistensi bias publik tersebut. Pada tahun 1990an, terjadi penurunan tingkat kejahatan yang sangat signifikan di Amerika Serikat. Para ahli dan media negara tersebut berusaha mengidentifikasi penyebab terjadinya penurunan tingkat kejahatan tersebut. Atau dengan kata lain, berusaha untuk menemukan variabel-variabel yang signifikan terhadap penurunan tingkat kejahatan.

Media berpengaruh AS pada era 1991-2001 yaitu Times, Washington Post, dll, menerangkan fenomena tersebut dengan mengidentifikasi variabel-variabel berupa: inovatifnya strategi polisi, membaiknya kebijakan pemenjaraan, perubahan di pasar narkoba, perubahan demografi, lebih ketatnya kontrol senjata, membaiknya ekonomi, dan bertambahnya kekuatan polisi seperti yang dapat dilihat pada tabel 2-3.

Penelitian yang dilakukan oleh Levitt berusaha mengidentifikasi: mana variabel yang benar-benar berperan secara signifikan dan mana variabel populis namun tidak berperan secara signifikan dalam penurunan tingkat kejahatan. Setidaknya, terdapat enam variabel populis namun tidak berperan atau berperan sedikit dalam penurunan tingkat kejahatan yaitu: menguatnya kondisi ekonomi, perubahan demografi, strategi polisi yang lebih baik, pengendalian penggunaan senjata, kebijakan izin membawa senjata secara sembunyi, dan peningkatan vonis mati. Sementara empat variabel lainnya yang memang berperan secara signifikan dalam penurunan kejahatan adalah peningkatan jumlah polisi, peningkatan populasi penjara, berkurangnya penggunaan narkoba, dan legalisasi aborsi.

Tabel 2-3
Penjelasan Media tentang Penurunan Tingkat Kejahatan pada Tahun 1990an

Penjelasan	Frekuensi Muncul di Media
Strategi Polisi yang Inovatif	52
Perbaikan Kebijakan Pemenuhan	47
Penurunan di Pasar Obat-obatan Terlarang	33
Perubahan Populasi	32
Pembatasan Penggunaan Senjata Api	32
Membaiknya Ekonomi	28
Penjelasan lain-lain	26

Sumber: Levitt (2004)

Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa dari delapan variabel yang populer disebut oleh media, hanya tiga variabel yang benar-benar berperan secara signifikan yaitu: peningkatan jumlah polisi, peningkatan populasi penjara, dan berkurangnya penggunaan narkoba. Sisanya merupakan variabel populis namun tidak signifikan. Sementara satu variabel lainnya, legalisasi aborsi, merupakan variabel yang tidak populer namun dianggap signifikan oleh Levitt terhadap penurunan tingkat kejahatan.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa variabel-variabel populis, yang dianggap oleh publik mempengaruhi tingkat kejahatan, sebagian besar tidak berpengaruh secara signifikan. Terdapat bias dalam persepsi publik mengenai faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Hal ini membawa dampak buruk berupa: variabel-variabel yang benar berpengaruh secara signifikan, namun tidak populis, potensial terabaikan sehingga tidak memperoleh perhatian dan anggaran publik yang semestinya.

Efek dari bias publik ini adalah misalokasi anggaran yang menghasilkan pemborosan anggaran publik. Anggaran yang dialokasikan untuk menekan tingkat kejahatan akan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, meskipun para politisi dipilih oleh publik, yang dapat dengan mudah terpengaruhi oleh bias persepsi oleh media, keputusan publik yang tepat untuk menekan tingkat kejahatan harus berdasarkan bukti ilmiah dan penelitian yang valid.

2.8. Kejahatan di Perkotaan

Para ahli kriminologi (Flango and Sherbenou [1976] ; Schichor, Decker, and O'Brien [1979] Larson [1984] ; Radzinowicz and Wolfgang [1977]; dan Wirth [1938]) sudah mengidentifikasi bahwa kejahatan lebih banyak terjadi di daerah perkotaan daripada pedesaan. Glaeser dan Sacerdote (1999) mengadakan penelitian untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan dipilihnya kota sebagai tempat favorit bagi para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya¹⁶. Beberapa variabel tersebut adalah: lebih tingginya *return* aksi kejahatan, lebih rendahnya kemungkinan tertangkap, dan lebih mudahnya menjalankan kejahatan individu di daerah perkotaan.

Perkotaan memberikan *return* aksi kejahatan yang lebih tinggi disebabkan kepadatan korban kejahatan yang lebih tinggi dan lebih mudahnya akses penjahat ke harta rampasan. Setidaknya, 13,33 persen sampai sepertiga penyebab terjadinya kejahatan di perkotaan adalah lebih tingginya harta rampasan aksi kejahatan. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk di perkotaan memberikan tersangka kejahatan yang lebih banyak sehingga mengecilkan kemungkinan pelaku kejahatan tertangkap. Setidaknya, faktor “lebih kecilnya kemungkinan pelaku kejahatan ditangkap” menjelaskan sekitar 10 persen dari penyebab terjadinya kejahatan di perkotaan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pemilihan untuk melakukan tindak kejahatan di kota atau desa dapat dianalogikan sebagai pemilihan instrumen investasi bagi investor normal. Pelaku kejahatan akan memilih untuk

¹⁶ Glaeser, Edward L. and Sacerdote, Bruce, 1999, *Why There is More Crime in Cities?*, The Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 6, Part 2: Symposium on the Economic Analysis of Social Behavior in Honor of Gary S. Becker. (Dec., 1999), pp. S225-S258.

melakukan tindak kejahatan properti di kota karena tingkat pengembalian (harta benda korban) yang relatif lebih besar daripada desa dan dengan resiko (probabilitas tertangkap) yang relatif rendah akibat tingginya kepadatan penduduk. Di sini terlihat bahwa pelaku kejahatan melakukan pendekatan rasional dalam melakukan aksinya di kota. Glaeser dan Sacerdote (1996) membuktikan bahwa peningkatan populasi sebesar 10 persen akan meningkatkan tingkat kejahatan properti sebesar 1,5 persen.

Fenomena yang menarik namun belum dapat dijelaskan pada penelitian ini adalah faktor banyaknya keluarga *single mother* -keluarga yang dikepalai oleh wanita- yang menjelaskan antara seperlima hingga sepertiga dari penyebab kejahatan di daerah perkotaan. Beberapa peneliti berhipotesa bahwa banyaknya calon korban dengan kepala rumah tangga wanita menyebabkan aksi kejahatan lebih mudah dilakukan dengan korban tersebut, sedangkan peneliti lainnya berhipotesa bahwa hal ini disebabkan banyaknya pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga *single mother*.

Tindak kejahatan di perkotaan menyebabkan terjadinya *urban flight*. Cullen dan Levit (1999) membuktikan bahwa peningkatan kejahatan di sebuah kota sebesar 10 persen akan menurunkan populasi kota tersebut sebesar 1 persen, dengan rumah tangga berpendidikan tinggi dan rumah tangga memiliki anak yang paling responsif terhadap peningkatan kejahatan tersebut.

2.9. **Kejahatan, Pendapatan Masyarakat dan Pengangguran**

Tabel 2-1 ekspektasi utilitas kejahatan memperlihatkan bahwa aksi kejahatan akan dilakukan apabila ekspektasi utilitas kejahatan lebih besar daripada utilitas pendapatan legal. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat mempengaruhi tingkat kejahatan melalui dua arah: positif dan negatif. Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, secara positif mempengaruhi tingkat kejahatan, dengan meningkatkan ekspektasi harta rampasan pelaku kejahatan. Namun kenaikan pendapatan bisa berpengaruh secara negatif karena menurunkan ekspektasi utilitas kejahatan secara relatif dan meningkatkan *opportunity cost* dari calon pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Kenaikan pendapatan menyebabkan calon pelaku kejahatan untuk tetap memilih melakukan pekerjaan di sektor legal daripada melakukan

kejahatan. Secara empiris, beberapa penelitian, Cloward dan Ohlin (1960), Fleischer (1966), Robert Merton (1967), Becker (1968), Bonger (1969), Phillips, Maxwell dan Votey (1972), Myers (1984), Grogger (1998), Doyle, Ahmed, dan Horn (1999), menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kejahatan properti. Namun, beberapa penelitian lainnya, Trumbul (1999) dan Eide (1994), menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan tingkat kejahatan.

Penelitian Doyle, Ahmed, dan Horne (1999) yang digunakan dalam studi ini menunjukkan hasil yang konsisten bahwa pendapatan berpengaruh positif dan negatif terhadap kejahatan. Pendapatan berpengaruh positif apabila variabel "*real income*" yang digunakan dalam regresi, sementara variabel "*upah*" berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan. Peningkatan 10 persen upah diperkirakan akan menurunkan tingkat kejahatan sebesar 5,8 persen. Sementara Machin dan Meghir (2000) menemukan bahwa peningkatan upah pekerja berpenghasilan rendah akan menurunkan tingkat kejahatan.

Variabel yang erat kaitannya dengan tingkat pendapatan adalah pengangguran. Pengangguran menyebabkan pendapatan berkurang atau hilang sama sekali sehingga memberikan ekspektasi utilitas kejahatan yang lebih besar kepada calon pelaku kejahatan. Oleh karena itu, secara teori, pengangguran berhubungan positif dengan tingkat kejahatan. Beberapa penelitian yang diadakan yaitu Freeman [1995], Gould, Weinberg, dan Mustard [1997], Machin dan Meghir [2000], Donohue dan Levitt [2001], dan Raphael dan Winter-Ebmer [2001], hampir semuanya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan namun kecil korelasi antara tingkat pengangguran dengan tingkat kejahatan properti. Peningkatan pengangguran sebesar satu persen diperkirakan meningkatkan kejahatan properti sebesar satu persen. Dalam halnya dengan variabel makroekonomi, Levitt (2004) mengemukakan bahwa variabel makroekonomi yang menguat dapat mempengaruhi

penurunan tingkat kejahatan secara tidak langsung melalui kebijakan budget yang lebih baik untuk kepolisian dan lembaga per masyarakatan¹⁷.

Berbeda dengan itu, Chiricos (1987) dan Allen (1996) menunjukkan hubungan positif antara peningkatan pengangguran dengan peningkatan kejahatan. Allen mengemukakan bahwa hubungan negatif terdapat pada hubungan pengangguran dengan kejahatan perampokan dan pembobolan rumah, sementara berhubungan positif dengan kejahatan kendaraan bermotor. Hubungan positif telah dijelaskan di atas sementara hubungan negatif berasal dari: anggota keluarga yang menganggur berada di rumah sehingga meningkatkan penjagaan harta benda di rumah dan mengurangi tingkat kejahatan properti dengan sasaran rumah.

2.10. Kejahatan, Kemiskinan, dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan di Masyarakat

Hubungan antara kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat dengan tingkat kejahatan muncul dari asumsi rasionalitas ekonomi kejahatan bahwa pelaku kejahatan merespon insentif. Pelaku kejahatan yang miskin memiliki ekspektasi harta rampasan yang relatif lebih banyak karena minimnya pendapatannya dan *opportunity cost* dipenjara yang lebih kecil. Sementara tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat menyediakan sebuah kondisi, di mana calon pelaku kejahatan berhadapan dengan insentif berupa potensi korban kejahatan dengan harta rampasan yang tinggi.

Secara empiris, hubungan antara kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, dan kejahatan telah diobservasi para ilmuwan sejak lama. Pada abad pertengahan, Thomas Van Aquino mengungkapkan adanya korelasi yang signifikan antara kemiskinan dengan kejahatan. Dalam teori kriminalitas sendiri, terdapat tiga teori berpengaruh yang menjelaskan hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pendapatan: Teori ekonomi kejahatan Becker (1968), teori *strain* Merton (1938), dan teori diorganisasi sosial Shaw dan McKay (1942). Teori-teori tersebut berusaha

¹⁷ Levitt, Steven D, 2004, *Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors That Explain the Decline and Six That Do Not*, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 1. (2004), pp. 163-190.

menjelaskan tingkat kejahatan yang bervariasi yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan.

Teori Becker menjelaskan bahwa faktor kesenjangan pendapatan menempatkan orang yang mendapatkan upah rendah dari sektor legal dengan orang yang memiliki harta berharga sangat tinggi pada satu daerah. Hal tersebut akan meningkatkan *return* dari aksi kejahatan di daerah tersebut sehingga tingkat kejahatan akan tinggi daerah tersebut. Sedangkan teori strain berpendapat bahwa perasaan frustrasi akan menghinggapi orang-orang yang tidak sukses ketika berhadapan dengan orang-orang sukses di sekitarnya. Semakin besar kesenjangannya, akan semakin besar rasa frustrasi tersebut sehingga akan memperbesar godaan untuk melakukan tingkat kejahatan. Sementara teori disorganisasi sosial berargumen bahwa kejahatan akan lebih sering terjadi apabila mekanisme kontrol sosial melemah. Faktor yang akan memperlemah mekanisme kontrol sosial tersebut adalah kemiskinan, kondisi ras yang heterogen, mobilitas penduduk yang tinggi, dan ketidakstabilan keluarga. Pada teori disorganisasi sosial, kesenjangan pendapatan yang tinggi dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang besar.

Teori bahwa kesenjangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kejahatan kekerasan dibuktikan oleh Shihadeh dan Steffensmeier (1994). Peningkatan kejahatan kekerasan tersebut, menurut Shihadeh dan Steffensmeier, terjadi melalui peningkatan kekacauan dalam rumah tangga akibat kesenjangan pendapatan. Sedangkan Doyle, Ahmed, Horn (1999) menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kejahatan properti namun berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan.

Selain itu, pada masalah kemiskinan, Morgan Kelly (2000) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kejahatan properti dengan menggunakan model berikut:

$$\log(\lambda) = \log(N) + \beta_0 \log(d) + \beta_1 \log(I) + \beta_2 \log(x) - \beta_3 \log(p)$$

λ , N , d , I , X , dan p berturut-turut adalah tingkat kejahatan, populasi, kepadatan penduduk, *inequality*, faktor-faktor (kemiskinan, ras, stabilitas keluarga, dan *residential mobility*), dan aktivitas polisi. Kelly memperlihatkan bahwa tingkat

kemiskinan dan aktivitas polisi berpengaruh signifikan terhadap kejahatan properti namun sedikit pada kejahatan kekerasan. Dari penelitian-penelitian tersebut (Kelly, dan Shihadeh dan Steffensmeier) dapat diambil kesimpulan bahwa teori ekonomi kejahatan memang dapat menjelaskan kejahatan properti, sementara untuk kejahatan kekerasan dapat lebih dijelaskan melalui teori sosial.

2.11. Kejahatan dan Proporsi Usia Produktif

Hubungan antara tingkat kejahatan dengan proporsi usia produktif (15-29 tahun) berasal dari identifikasi tingginya proporsi tersangka tindak penahanan dari kelompok usia tersebut, selama beberapa dekade terakhir. Secara teori, aksi kejahatan akan menghasilkan ekspektasi utilitas yang lebih tinggi apabila biayanya lebih rendah dengan probabilita aksi berhasil yang lebih tinggi. Pada usia 15-29, manusia mencapai kemampuan fisiknya yang prima sehingga memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan aksinya dengan kesempatan berhasil lebih besar. Selain itu, dengan kemampuan fisik tersebut, pelaku kejahatan juga lebih mampu menghindar dari penangkapan dan lebih mampu untuk bertahan di penjara. Hal tersebut menyebabkan perubahan proporsi penduduk usia 15-29 tahun dapat menggeser kurva penawaran kejahatan (Becci, 1999).

Oleh karena itu, sebagian besar penelitian ekonomi kejahatan selalu memasukkan variabel demografi penduduk berupa proporsi penduduk usia 15-29 tahun sebagai variabel independen yang mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Kebanyakan penelitian empiris seperti Doyle, Ahmed, dan Horn (1999) menunjukkan bahwa variabel tersebut memang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan, meski Levitt (2004) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan namun kecil terhadap perubahan tingkat kejahatan.

2.12. Kejahatan, Masalah Keluarga, dan Proporsi *Single Mother*¹⁸

Glaeser dan Sacerdote (1996) menunjukkan bahwa faktor banyaknya keluarga *single mother* di kota menjelaskan 20 hingga 33 persen penyebab kejahatan di daerah perkotaan. Namun demikian, Glaeser dan Sacerdote belum mampu menemukan penghubung antara banyaknya keluarga *single mother* di kota dengan tingginya tingkat kejahatan. Beberapa peneliti berhipotesis bahwa hal ini disebabkan banyaknya pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga *single mother*.

Sementara itu, Levitt (2004) berhipotesis bahwa legalisasi aborsi merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan tingkat kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1990an. Hipotesis ini berasal dari dua premis. Pertama, “anak yang tidak diinginkan” memiliki resiko yang lebih besar untuk melakukan kejahatan. Kedua, legalisasi aborsi akan mengurangi jumlah anak yang tidak diinginkan. Oleh karenanya, aksi aborsi diperkirakan akan mengurangi jumlah calon pelaku kejahatan. Pada rekomendasi penelitiannya, dan pada buku *Freakonomics*, Levitt merekomendasikan legalisasi aborsi untuk menurunkan tindak kejahatan di Amerika Serikat.

Penelitian Levitt sepertinya berasal dari pemikiran bahwa, pada umumnya, para pelaku kejahatan berasal dari keluarga berantakan yang dibesarkan oleh *single mother*. Penelitian yang dilakukan oleh Left-wing Progressive Policy Institute pada tahun 1996 memperlihatkan bahwa sekitar 70 persen tahanan bervonis lama di penjara remaja Amerika Serikat dibesarkan oleh keluarga *single mother*. Anak yang dibesarkan dalam keluarga *single mother*, dibandingkan yang berasal dari keluarga normal, memiliki resiko untuk lima kali lebih besar melakukan bunuh diri, sembilan kali lebih beresiko dikeluarkan sekolah, sepuluh kali lebih beresiko menyalahgunakan narkoba, (anak pria) 14 kali lebih beresiko untuk melakukan pemerkosaan, 20 kali lebih beresiko untuk berakhir dipenjara, dan 32 kali lebih beresiko untuk lari dari rumah. Penelitian Franke (2000) dengan menggunakan data *Add-Health* juga

¹⁸ *Single mother* didefinisikan sebagai keluarga dengan ibu sebagai kepala keluarga, dengan tetap membuka kemungkinan adanya ayah dan keluarga besar (kakek dan nenek) lainnya sebagai anggota keluarga.

membuktikan bahwa anak yang besar di keluarga *single mother* memiliki kemungkinan dua kali lebih besar untuk melakukan perampokan.

Selain itu, penelitian Haynie, Dana L. and Stephens, Crystal M. (2006) memperlihatkan bahwa para remaja yang dibesarkan pada keluarga *single mother* memiliki peluang lebih besar untuk berteman dengan orang yang melakukan perkelahian, mengkonsumsi alkohol, dan bermasalah secara akademis. Smith and G. R. Jarjoura (1988) yang menganalisa data korban dari tiga daerah berbeda di New York juga menemukan bahwa proporsi *single mother* dapat digunakan untuk mengestimasi tingkat kejahatan kekerasan dan perampokan.

Anak yang besar dalam keluarga *single mother* diperkirakan lebih rentan terhadap masalah-masalah sosial akibat: depresi karena menjadi tempat pelampiasan kemarahan ibu yang frustrasi akibat kegagalan perkawinan dan masalah ekonomi, kurangnya kontrol yang dilakukan oleh keluarga, kurangnya pendidikan yang diberikan akibat keterbatasan kemampuan ekonomi ibu, tidak adanya *role model* maskulin yang baik, dan diambalnya *role model* dan *peer group* yang salah berupa *gang* kejahatan yang memberikan citra maskulin.

2.13. Kejahatan dan Kekuatan Kepolisian

Secara teori, kekuatan kepolisian berpengaruh terhadap tingkat kejahatan dengan cara memperbesar biaya bagi pelaku tindak kejahatan (peluang tertangkap) sehingga memperkecil ekspektasi utilitas dari tindak kejahatan. Oleh karenanya, kekuatan kepolisian yang bertambah akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kejahatan. Terdapat beberapa estimasi untuk besaran pengaruh peningkatan jumlah polisi terhadap penurunan tingkat kejahatan. Marvel dan Moody (1996) mengestimasi bahwa elastisitas tersebut sebesar -0,3. Sementara penelitian Corman dan Mocan (2000) menghasilkan estimasi elastisitas jumlah polisi terhadap tingkat kejahatan sebesar -0,452. Levitt (2002) mengestimasi elastisitas tersebut berkisar antara -0,43 sampai dengan -0,5.

Selain itu, Levitt (2004) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menurunkan tingkat kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1990an adalah

penambahan jumlah polisi. Dengan menggunakan elastisitas jumlah polisi terhadap tingkat kejahatan sebesar -0,4 Levitt berargumen bahwa peningkatan jumlah polisi di AS berpengaruh sebesar 10 hingga 20 persen dari total penurunan kejahatan di AS pada tahun 1990an.

2.14. Penelitian Doyle, Ahmed dan Horne (1999)

Pada tahun 1999, Doyle, Ahmed dan Horne (1999) mengadakan penelitian dengan menggunakan data panel, 48 negara bagian Amerika Serikat dari tahun 1984 hingga 1993, untuk menguji pengaruh pasar tenaga kerja terhadap tingkat kejahatan. Model yang digunakan pada penelitian tersebut adalah:

$$\ln PCRIME_{it} = \beta_1 \ln WAGE_{it} + \beta_2 \ln GINI_{it} + \beta_3 \ln YMEN_{it} + \beta_4 \ln PAP_{it} + \beta_5 \ln POLICE_{it} + \alpha_i + \epsilon_{it}$$

Dengan variabel-variabel sebagai berikut:

PCRIME	= jumlah kejahatan properti / jumlah penduduk
WAGE	= URATE merupakan tingkat pengangguran, Sal upah rata-rata bulanan, dan COMP adalah kompensasi yang diberikan pemerintah setiap tahunnya kepada pengangguran, sesuatu yang tidak ada di Indonesia.
GINI	= koefisien gini di suatu negara bagian
YMEN	= proporsi penduduk berjenis kelamin pria berusia 19-25 tahun
PAP	= Probabilita tertangkap → kejahatan diselesaikan / dilaporkan polisi
POLICE	= proporsi petugas polisi terhadap populasi penduduk

Penelitian tersebut ingin menguji dampak dari pasar tenaga kerja terhadap tingkat kejahatan, dimana faktor yang paling sensitif dalam pasar tenaga kerja adalah

upah. Upah didefinisikan dalam penelitian tersebut sebagai *opportunity cost* dari kejahatan yang gagal/tertangkap sehingga berhubungan negatif dengan tindak kejahatan. Namun, efek positif dari upah terhadap tindak kejahatan akan terjadi apabila peningkatan upah meningkatkan ekspektasi besarnya harta rampasan bagi pelaku kejahatan. Dalam penelitian tersebut, Doyle, Ahmed dan Horn menjadikan variabel pendapatan per kapita per bulan sebagai *proxy* yang menjelaskan benefit dalam aksi kejahatan.

Namun, sebagai *proxy* yang menjelaskan pendapatan pekerja di sektor legal, variabel upah rerata memiliki kelemahan. Hal ini disebabkan mayoritas pelaku kejahatan merupakan orang-orang dengan keahlian dan pendidikan rendah sehingga tidak bisa digeneralisir bagi semua sektor pekerjaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan upah per sektor sebagai variabel independen. Sektor-sektor pekerjaan yang dianggap cukup kredibel untuk menjelaskan efek negatif dari peningkatan upah ke tingkat kejahatan adalah: pertanian, pertambangan, konstruksi, manufaktur, transportasi dan fasilitas publik, perdagangan, keuangan, asuransi, dan pemerintahan.

Selain itu, model menguji signifikansi tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat terhadap kejahatan dengan menggunakan variabel independen berupa koefisien gini. Menurut teori, kesenjangan pendapatan di masyarakat akan meningkatkan tingkat kejahatan karena: menempatkan orang dengan *opportunity cost* melakukan tindak kejahatan yang rendah berdampingan dengan ekspektasi harta rampasan yang tinggi. Namun, penelitian ini tidak mempostulatkan signifikansi kesenjangan pendapatan terhadap tingkat kejahatan. Selain itu, variabel YMEN atau pria berusia 15–29 tahun (profil terbesar pelaku kejahatan) diuji untuk melihat apakah penambahan proporsi ini pada populasi berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan.

Setelah mengeksplor bagian penawaran kejahatan, penelitian tersebut meneliti dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kejahatan yaitu perlindungan harta rampasan. Penelitian ini menggunakan dua variabel untuk menjelaskan perlindungan harta rampasan yaitu PAP dan POLICE. PAP merupakan

tingkat penyelesaian kasus kejahatan, diperoleh dari jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus dilaporkan. POLICE merupakan proporsi petugas polisi terhadap populasi penduduk, variabel yang berdasarkan banyak penelitian berdampak signifikan negatif terhadap tingkat kejahatan.

Hasil studi Doyle, Ahmed, dan Horne menunjukkan bahwa upah memang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kejahatan properti dan kejahatan kekerasan. Dari semua upah rerata sektor pekerjaan yang diuji, sektor yang paling signifikan pengaruhnya adalah sektor dengan keahlian rendah yaitu penjualan dan retail. Penelitian ini lalu merekomendasikan pentingnya perbaikan pasar tenaga kerja keahlian rendah yang berdampak cukup besar terhadap penurunan tingkat kejahatan.

Hasil uji variabel tingkat kesenjangan pendapatan -yang populer disebut sebagai penyebab tingginya tingkat kejahatan- memperlihatkan bahwa variabel tersebut ternyata tidak signifikan mempengaruhi tingkat kejahatan baik properti maupun kekerasan. Hasil yang berbeda terjadi pada variabel proporsi populasi pria umur 15-29 (YMEN). Pada hasil pengujian variabel ini, peningkatan populasi pria umur tersebut akan berpengaruh positif terhadap tingkat kejahatan properti dan berpengaruh negatif terhadap kejahatan dengan kekerasan.

Hasil pengujian terhadap sisi permintaan dari kejahatan, yang dalam penelitian direpresentasikan oleh PAP dan POLICE, menunjukkan hasil beragam. Hasil uji penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penambahan kekuatan kepolisian tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kejahatan sementara kenaikan tingkat penyelesaian kasus yang tinggi akan mengurangi tingkat kejahatan. Hal tersebut membuat penelitian ini merekomendasikan kebijakan perbaikan strategi kepolisian daripada kebijakan penambahan kuantitas polisi.

2.15. Penelitian Husnayain (2006)

Husnayain (2006) meneliti mengenai pengaruh variabel ekonomi dan demografi terhadap tingkat kejahatan di Indonesia pada tahun 2005. Model yang digunakan pada penelitiannya mengadopsi model Doyle, Ahmed, dan Horne mengenai pengaruh pasar tenaga kerja terhadap tingkat kejahatan. Pada penelitian

Husnayain, model tersebut dimodifikasi dengan penghilangan variabel kompensasi terhadap pengangguran yang pada model Doyle, Ahmed, dan Horne masuk pada variabel upah rata-rata.

$$WAGE = (1 - UR_{it})SAL_{it} + UR_{it}COMP_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Pada penelitian Husnayain, variabel WAGE yang tadinya untuk menjelaskan pasar tenaga kerja diubah menjadi upah rata-rata dan pengangguran, dimana:

$$WAGE = SAL + UR \dots\dots\dots(2)$$

sehingga model hasil modifikasi Husnayain menjadi:

$$Pcr = \beta_1 Salary + \beta_2 UR + \beta_3 YM + \beta_4 PAP + \beta_5 POLICE - \beta_6 GINI$$

Di mana:

- SAL_i = upah rata-rata per bulan tahun 2005 pekerja di provinsi i
- UR_i = tingkat pengangguran tahun 2005 di provinsi i
- PAP_i = tingkat penyelesaian kasus oleh kepolisian, yaitu rasio kasus dilaporkan yang berhasil diselesaikan di provinsi I
- POLICE_i = jumlah polisi bertugas per 100,000 penduduk pada provinsi i
- GIN_i = koefisien gini provinsi i tahun 2005
- YMEN_i = proporsi pria usia 15-29 tahun dalam populasi penduduk di provinsi i tahun 2005

Berdasarkan pada dua penelitian tersebut, penulis memodifikasi model sehingga bisa dipergunakan untuk melihat pengaruh variabel *dummy* daerah kota atau bukan kota, tingkat kemiskinan, dan tingkat proporsi keluarga *single mother* terhadap tingkat kejahatan. Berbeda dengan kedua penelitian yang menggunakan data pada tingkat provinsi/negara bagian, penulis menggunakan data pada tingkat kabupaten/kota dan terbatas pada daerah Jawa. Selain itu, data tingkat kejahatan yang digunakan oleh penulis yaitu data penduduk terkena kejahatan per total penduduk dari Susenas 2007. Data ini merupakan data dengan pendekatan terbaik yang dapat menghindari *undervalue* dari laporan kejahatan properti ke polisi.